

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DELIA STABAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : HAMIRA ALDI OLIFIOSA**  
**NPM : 1405170791**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : HAMIRA ALDI OLIFIOSA  
N P M : 1405170791  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DELIA STABAT

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

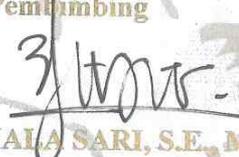
Penguji I

Penguji II

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

  
ISNA ARDILA, S.E., M.Si

Pembimbing

  
Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, AK

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Skripsi ini disusun oleh :**

**Nama Mahasiswa : HAMIRA ALDI OLIFIOSA**  
**NPM : 1405170791**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DELIA STABAT**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi**

**Medan, Oktober 2018**

**Pembimbing Skripsi**

**Dr. EKA NURMALIA SARI, SE, M.Si, Ak**

**Diketahui/Disetujui**

**Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

**Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



**H. TANURI, SE, MM, M.Si**

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMIRA ALDI OLIFIOSA

NPM : 1405170791

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari internet dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 17 Oktober 2018  
Saya yang menyatakan



**HAMIRA ALDI OLIFIOSA**



## ABSTRAK

### **Hamira Aldi Olifiosa (1405170791) Analisis Penerapan *Good corporate governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat.**

Penelitian yang dibuat oleh peneliti bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Good Governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good corporate governance* belum berjalan optimal Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara. bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

Dari hasil penelitian ini diperoleh prinsip transparansi RSU Delia masih belum melaksanakan secara menyeluruh dikarenakan informasi laporan keuangan tidak seluruhnya diketahui oleh direktur. Dari sisi transparansi yang sudah dijalankan, subjek penelitian sudah menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis dengan jelas. Penyampaian mengenai informasi kebijakan telah disampaikan secara terbuka melalui rapat-rapat dan secara lisan maupun tertulis. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal.

**Kata Kunci :** *Good corporate governance*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Penerapan *Good corporate governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat**”

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Hafikar Sukarna** dan Ibunda **Sri Wahyuni Nst** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
6. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2018

**Hamira Aldi Olifiosa**  
**1405170791**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teoritis.....	<b>11</b>
1. <i>Good corporate governance (GCG)</i> .....	11
2. Prinsip <i>Good corporate governance (GCG)</i> .....	12
3. Unsur-Unsur <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
4. Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> .....	18
5. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kerangka Berfikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Definisi Operasional .....	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Gaji Karyawan Pemberian Jaminan Kesehatan .....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	26
Tabel III.2	Kisi-Kisi Wawancara .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	23
-------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan, misalnya *shareholders* dan *bondholders*, dari perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan *control* terhadap manajer.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: (1) perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang

aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi),

(2) konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan

(3) perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia, praktik GCG telah mendapat perhatian yang cukup besar, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus yang terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan lain-lain. Selain itu, dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah juga mendorong praktik dan pengungkapan GCG di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan Pasal

74 berisi tentang kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, selain untuk mendorong praktik dan pengungkapan GCG, juga untuk memenuhi tuntutan akan penerapan *Good corporate governance* dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik.

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *Corporate Governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *good corporate governance* (GCG) suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen

dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder's* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder's*-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu mengurangi aktivitas menyimpang seperti rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya (Kaihatu, 2006). Selain itu, prinsip *responsibility* dalam penerapan GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam struktur *Corporate Governance*, terdapat elemen-elemen yaitu jumlah komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komisaris wanita, independensi komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah. Elemen-elemen inilah yang berperan untuk mengolah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara *finansial* yang diharapkan dan juga melakukan aktivitas non financial. Selain itu terdapat elemen *leverage* yaitu hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya di luar sumber dana modal dan ekuitas.

Dewan Komisaris merupakan salah satu elemen penting bagi tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan sehingga dikelola dengan semestinya oleh agen mereka (Said, et al 2009). Di Indonesia, dewan komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris bertugas memberikan pengarahan dan nasehat kepada direksi dan memastikan bahwa direksi telah melaksanakan GCG dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (UU No. 40 Th. 2007).

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas dewan.

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan permasalahan yang akan timbul di antara prinsipal dan agen atau antara pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena kecilnya kepemilikan oleh

agen di perusahaan (Said, et al 2009). Hal ini dapat menjadi penyebab tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer, dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal.

Kepemilikan asing salah satu karakteristik *Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan GCG. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas.

Penerapan GCG merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. GCG merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas GCG-nya. Penerapan GCG pada perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu *Transparansy*. Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas GCG tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri.

Salah satunya dilakukan oleh Said, et al (2009) yang meneliti perusahaan-perusahaan di Malaysia yang telah terdaftar sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya, Said, et al mengambil delapan karakteristik *Corporate Governance* yaitu, ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, independensi komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, yang diuji hubungannya dengan pengungkapan *Good corporate governance (GCG)*.

UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mendefinisikan tata kelola rumah sakit (*good hospital governance*) yang baik sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.

Hasil penelitian Said, et al (2009) menunjukkan hanya dua variabel yang berhubungan dengan *GCG disclosure*, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan GCG, dimana variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan GCG. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GCG.

**Tabel I.1**  
**Data Gaji Karyawan Pemberian Jaminan Kesehatan**

Bagian	Status	Gaji Pokok	Jaminan
Penunjang Medik	Tetap	2.175.000	BPJS
Kordinasi Teknis	Tetap	1.800.000	BPJS
Teknisi	Tetap	1.500.000	
Petugas Kebersihan	Tetap	950.000	
Ka. Instalasi Gizi	Tetap	2.100.000	BPJS
Ka. Instalasi Laboratorium	Tetap	2.100.000	BPJS

**Sumber : RSU Delia (2018)**

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat beberapa masalah yang terjadi pada RSU Delia contohnya penerapan prinsip *good corporate governance* yang belum ditunjukkan yaitu gaji karyawan yang belum sesuai UMK (2.300.000), serta ada beberapa karyawan yang belum diikutsertakan BPJS dan pada laporan keuangan RS Delia khususnya pada laporan laba rugi tidak mencantumkan beban pokok pendapatan, sementara menurut Budiarti (2010:75) Terciptanya *Good corporate governance* (GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun faktor internal yang berpotensi menghambat.

Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan GCG. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan GCG.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Said, et al (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan GCG. Kepemilikan terkonsentrasi diteliti oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan GCG. Hasil berbeda terlihat pada hasil penelitian Halme dan Huse (1997) serta Ghazali dan Wheatman (2006) dalam Said, et al (2009) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan yang terkonsentrasi dengan pengungkapan GCG. Kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan hak pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam menentukan keputusan strategi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja pengelolaan keuangan yang berjudul “ **Analisis Penerapan *Good corporate governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum transparansi RSUD Deli pada laporan keuangan beban pokok pendapatan tidak dimasukan oleh perusahaan ke laporan laba rugi RS Delia Stabat
2. Penerapan responsibilitas RSUD belum berjalan dengan baik seperti gaji karyawan yang belum sesuai UMK
3. Belum adanya keadilan yang dilakukan RSUD Delia seperti ada beberapa karyawan yang belum diikutsertakan BPJS

### **C. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana penerapan *Good corporate governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat ?
2. Apa yang menyebabkan penerapan prinsip *Good corporate governance* belum berjalan optimal Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Good Governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good corporate governance* belum berjalan optimal Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat.

### **Manfaat Penelitian.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan mengenai *Good corporate governance*.

2. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan *Good corporate governance*.

3. Bagi Peneliti Berikutnya.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi calon peneliti yang akan meneliti dengan judul yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. *Good corporate governance (GCG)***

*Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate Governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan

usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan dampak atas aktivitas operasional perusahaan. GCG diwujudkan agar terjaga keseimbangan di antara pelaku bisnis dan masyarakat sekitarnya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

## **2. Prinsip *Good corporate governance* (GCG)**

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut

Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu :

1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan

perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

#### 4) *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good corporate governance* bagi Bank Umum, diantaranya: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1) *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

## 2) *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4) *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang

saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

### **3. Unsur-Unsur *Good corporate governance***

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu :

#### 1) *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- a) Pemegang saham
- b) Direksi
- c) Dewan komisaris
- d) Manajer
- e) Karyawan
- f) Sistem remunerasi berdasar kinerja
- g) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- a) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure);
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Kesetaraan
- e) Aturan dari code of conduct

## 2) *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- a) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- b) Investor
- c) Institusi penyedia informasi
- d) Akuntan publik
- e) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- f) Pemberi pinjaman
- g) Lembaga yang mengesahkan legalitas

### **4. Manfaat dan Tujuan *Good corporate governance***

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good corporate governance* menurut Hery (2010), yaitu :

- a. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.

- e. Mengurangi korupsi.

Penerapan *Good corporate governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.

##### **5. *Good Hospital Governance* (GCG) Rumah Sakit**

UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mendefinisikan tata kelola rumah sakit (*good hospital governance*) yang baik sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.

Menurut Kristof Eeckloo dalam (Windrya 2012) mendefinisikan hospital governance atau tata kelola rumah sakit sebagai suatu proses pengaturan keseluruhan fungsi rumah sakit yang dipahami oleh seluruh komponen rumah sakit dan menetapkan tujuan rumah sakit, serta selanjutnya mendukung dan memantau implementasi misi dan tujuan rumah sakit tersebut pada tingkat operasi rumah sakit.

Sistem *good hospital governance* dan organisasi perawatan kesehatan didasarkan pada sebuah model manajerial yang tepat sesuai dengan struktur usaha rumah sakit. Alasan penerapan corporate governance di rumah sakit dalam (Windrya 2012) adalah sebagai berikut:

1. *Corporate governance* menciptakan peraturan
2. *Corporate governance* membantu rumah sakit dalam mengembangkan kinerjanya, dan
3. *Corporate governance* membantu proses manajemen dan perencanaan rumah sakit.

Tata kelola rumah sakit dilandasi oleh dua prinsip utama, yang juga merupakan prinsip utama dari sistem good corporate governance pada umumnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan tanggung jawab terhadap pemegang saham yang pada akhirnya mengarah pada nilai pemegang saham jangka panjang. Sistem tersebut juga harus melibatkan stakeholders, baik secara kelompok maupun individu, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Hal

tersebut dilakukan dalam rangka untuk memastikan pembangunan organisasi atau perusahaan yang seimbang.

## 5. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Catur Ari W (2009)	Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> di PT Pupuk Kujang Nusantara	Masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG antara lain tentang belum adanya peraturan pemberian hadiah yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, belum adanya komisararis independen, serta belum di buatnya peraturan tentang compliances untuk mencegah self dealing
2	Gumilang (2018)	Peranan audit internal terhadap penerapan <i>good corporate governance</i> pada PT Perkebunan Nusantara III	Secara parsial peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III
3	Diana Fajarwati (2013)	Penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> pada Perum Bulog	Secara keseluruhan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> pada Perum Bulog telah terlaksana dengan cukup baik namun

			masih diperlukan peningkatan terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas
4	Any Maskur (2012)	Analisis Pelaksanaan <i>Good corporate governance</i> di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero)	Tingkat pelaksanaan GCG di UKM Binaan PT Taspen sebagian besar (54%) sudah berkategori baik. Responsibilitas menjadi prinsip yang paling banyak dilaksanakan, sedangkan transparansi menjadi yang paling sedikit dilaksanakan
5	Agung Rakhmat (2013)	Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Kasus Pada Community Development Center Pt Telkom Malang)	Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.
6	Djohari Santosa (2008)	Kegagalan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Publik Di Indonesia	Penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia dapat dikatakan gagal untuk diterapkan. Padahal, kehadiran GCG di Indonesia merupakan hal yang vital sebagai salah satu solusi untuk menciptakan

			kegiatan berusaha yang kondusif dan dapat menghindarkan segala bentuk skandal dalam suatu perusahaan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan budaya korupsi yang sangat tinggi dan etika berusaha yang rendah
--	--	--	---

### **B. Kerangka Berfikir.**

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dan menganut pada *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Corporate Governance* meliputi hubungan dalam manajemen antara lain direksi, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Dan juga bahwa *Governance* merupakan proses yang dipengaruhi oleh top management dalam menyampaikan pengarahan, dan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan ke depan, maka berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (Sanim, 2011: 37-38).

Menurut KNKG (2006) Transparansi merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip transparansi pada

rumah sakit ini dilihat dari aspek penyampaian visi, misi, kebijakan rumah sakit, serta informasi yang dibagikan karyawan dan pemerintah.

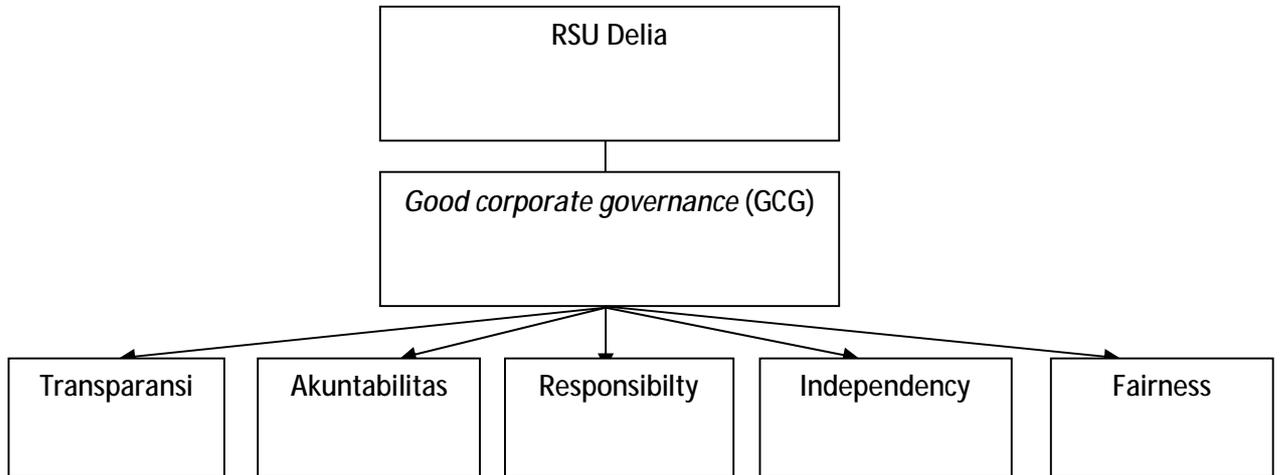
Menurut KNKG (2006) *Accountability* yaitu mengenai rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ serta kinerja dalam rumah sakit. Pada prinsip *accountability* di rumah sakit penyampaian dan penjelasan mengenai tanggungjawab masing-masing di sampaikan secara tertulis atau lisan. Mengenai alur pertanggung jawaban pun harus sangat jelas. Setiap staff atau perawat rumah sakit wajib melaporkan setiap kegiatannya kepada kepala unit masing-masing.

Menurut KNKG (2006) *Responsibility* merupakan bentuk kepatuhan rumah sakit terhadap hukum dan perundang-undangan tentang pelayanan rumah sakit serta tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar.

Menurut KNKG (2006) *Independency* yaitu rumah sakit harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Rumah Sakit harus mengelola perusahaan secara profesional, bila terjadi konflik dalam rumah sakit maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan.

Menurut KNKG (2006) *Fairness* yaitu rumah sakit harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas atau minoritas, pasien serta karyawan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Rumah sakit memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk memberkan saran dan pendapatnya untuk memajukan perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan

#### **B. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas yaitu Pertumbuhan Laba, Struktur Aktiva dan pendanaan eksternal. Masing – masing variabel penelitian secara opsional dapat di defenisikan seperti dibawah ini :

##### **1. GCG**

Salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun faktor internal yang berpotensi menghambat

##### **a. Transparansi**

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

**b. Akuntabilitas**

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

**c. Responsibility**

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

**d. Independency**

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**e. Fairness**

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat : Penelitian di lakukan di RSUD Delia Stabat

Waktu : Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018																					
	Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1. Pengajuan judul	■																					
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■														
3. Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■	■										
4. Seminar Proposal										■												
5. Pengumpulan Data											■	■	■	■	■	■						
6. Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau																						■

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

##### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang ada di RSUD Delia terkait dengan penerapan GCG.

##### **Sumber Data**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Menggunakan wawancara agar memperoleh informasi dari berbagai narasumber mengenai penerapan GCG di Rumah Sakit.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan RSUD Delia Stabat periode 2016-2017

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Dokumentasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan RS Delia (data terlampir)
2. Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

**Tabel III.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Variable	Dimensi	Indikator	Total
1	<i>Good corporate governance</i>	a. Transparency	1. Keterbukaan dalam rapat 2. Keterbukaan Informasi 3. Keterbukaan prosedur 4. Keterbukaan register 5. Keterbukaan menerima peran	1,2,3
		b. Accountability	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas program 5. Akuntabilitas finansial	1,2,3
		c. Responsibility	1. Parameter standar upah karyawan 2. Daftar cakupan kewajiban perusahaan	1,2,3

		d. Independency	1. Penyusunan Program 2. Investigasi 3. Pelaporan	1,2,3
		e. Fairness	1. Adil dalam memberikan tunjangan 2. Adil dalam pembagian kerja 3. Adil dalam memberikan gaji	1,2,3

## F. Teknik Analisis Data

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai penerapan GCG

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengobservasi objek penelitian
2. Menyusun daftar wawancara
3. Melakukan wawancara
4. Menganalisis hasil wawancara
5. Mengevaluasi hasil wawancara dengan sumber-sumber terkait dengan penelitian ini.
6. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum RSUD Delia**

RSU Delia yaitu satu dari sekian Layanan Kesehatan milik Organisasi Sosial Langkat yang berbentuk RSU, dinaungi oleh Pemda Kabupaten Perorangan dan tercatat kedalam Rumah Sakit Kelas **D**. Layanan Kesehatan ini telah terdaftar mulai 30/01/2013 dengan Nomor Surat Izin 440-3370/RS/KPT/2010 dan Tanggal Surat Izin 16/11/2010 dari Kantor Pelayanan Terpadu dengan Sifat Perpanjang, dan berlaku sampai 5 Tahun. Sesudah mengadakan Metode AKREDITASI Rumah sakit Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I ( 5 Pelayanan) akhirnya ditetapkan status Bersyarat Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di Jl. K.H. Dewantara No.24 Kec. Selesai Kabupaten Langkat, Langkat, Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, ekspektasi pemenuhan kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Stabat semakin meningkat. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Kabupaten Langkat menyambut hal tersebut dengan rencana peningkatan status Klinik Rawat Inap Delia menjadi Rumah Sakit Umum Delia.

Adapun jumlah kamar di RSUD Delia menurut Kelas :

1. VVIP : 3 kamar
2. VIP : 11 kamar
3. I : 20 kamar
4. II : 15 kamar

5. III : 50 kamar
6. ICU : 4 kamar
7. PICU : 0 kamar
8. NICU : 0 kamar
9. HCU : 0 kamar
10. ICCU : 0 kamar
11. TT di IGD : 4 kamar
12. TT Bayi Baru Lahir : 7 kamar
13. TT Kamar Bersalin : 3 kamar
14. TT Ruang Operasi : 1 kamar
15. TT Ruang Isolasi : 5 kamar

Terdiri dari 11 Poliklinik Spesialistik yaitu:

1. Poli Kebidanan dan Kandungan
2. Poli Penyakit Anak
3. Poli Bedah Umum
4. Poli Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorok
5. Poli Penyakit Gigi

Pelayanan Peninjang Diagnosa Lainnya sebagai berikut:

1. Instalasi Farmasi
2. Instalasi Gizi
3. Instalasi Rehabilitasi Medik
4. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR)
5. Unit Washrey / Laundry
6. Ambulance / Mobil Jenazah
7. Pemulasaran Jenazah

## 8. Insenerator

Jumlah pegawai RSUD Delia adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Struktural : 91
2. Tenaga Fungsional : 153
- Jumlah : 244

## 2. Deskripsi Data

Dengan berjalannya rencana perubahan status Klinik Rawat Inap Aisyiyah Pandaan menjadi Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyiyah Pandaan, maka RSUD Delia berkepentingan untuk mulai meletakkan landasan bagi pelaksanaan Good Corporate Governanance dimasa yang akan datang untuk mencapai kinerja Rumah Sakit yang baik dalam mencapai pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

*Good Corporate Governanance* diterapkan di RSUD Delia berawal dari keluarnya izin lokasi, Klinik Rawat Inap Aisyiyah Pandaan menjadi RSUD Delia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur RSUD Delia selaku pengawas dan pengendali Corporate Governanance: RSUD Delia menerapkan tata kelola perusahaan. Sebelumnya statusnya hanya klinik karena legal formal rumah sakit belum keluar, tetapi izin lokasi rumah sakit sudah keluar, jadi perusahaan bisa dikatakan rumah sakit. Meskipun masih klinik dan ancang-ancang menjadi rumah sakit, tapi manajemen RSUD Delia, sudah manajemman rumah sakit. Sudah SIRS (sistem informasi rumah sakit), jadi billing system sudah terintegrasi akan tetapi program ini masih baru dan masih dalam penataan., Dengan manajemen yang baru diharapkan kinerja rumah sakit semakin bagus untuk kedepannya.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa RSUD Delia telah menjalankan manajemen rumah sakit dengan menggunakan sistem informasi rumah sakit (SIRS), sehingga *billing system* terintegrasi. SIRS sendiri merupakan pedoman dalam mengatur pelaksanaan kinerja rumah sakit agar berjalan optimal dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Adapun SIRS sendiri adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Sistem informasi ini mencakup semua Rumah Sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. SIRS ini merupakan penyempurnaan dari SIRS Revisi V yang disusun berdasarkan masukan dari tiap Direktorat dan Sekretariat dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hal ini diperlukan agar dapat menunjang pemanfaatan data yang optimal serta semakin meningkatnya kebutuhan data saat ini dan yang akan datang.

Manfaat dari SIRS sendiri adalah dapat berperan sebagai subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional dalam memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Mampu mengaitkan dan mengintegrasikan seluruh arus informasi dalam jaringan Rumah Sakit dalam suatu sistem yang terpadu. Dapat menunjang proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan operasional pada berbagai tingkatan. Dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap usaha-usaha pengembangan sistem informasi rumah sakit yang telah ada maupun yang sedang dikembangkan. (Heru:2012)

### **a. Transparansi**

Salah satu upaya RSUD Delia dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, terutama dalam hal transparansi yakni dengan mengadakan RAP (Rencana Anggaran Perusahaan) dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) untuk merancang program dan evaluasi kinerja tahunan RSUD Delia, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Penunjang Umum RSUD Delia mengungkapkan bahwa; RSUD membuat rencana anggaran perusahaan setiap tahunnya, jadi dalam satu tahun RSUD mengetahui perencanaannya, pengeluarannya, anggaran keuangannya. Sedangkan LPJnya laporan pertanggung jawaban, dalam satu tahun itu apa yang perusahaan kerjakan dari rencana kerja perusahaan satu tahun itu. Dengan demikian dapat dilihat yang sudah terealisasi dan belum terealisasi.

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa upaya penerapan prinsip-prinsip transparansi dilakukan melalui RAP (Rencana Anggaran Perusahaan) dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dimana pada rapat-rapat tersebut dirancang program dan evaluasi kinerja tahunan RSUD Delia.

Selain itu, bentuk transparansi yang lain berupa penyediaan laporan keuangan. Hal ini diperlukan karena laporan keuangan merupakan salah satu sarana yang dipergunakan rumah sakit untuk menjaga terlaksananya transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh Kabag pelayanan medis: Transparansi keuangannya sudah transparan, kalau orang paham keuangan itu bisa dibaca di laporan keuangan, laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Publikasi, kita hanya untuk pengurus sama jajaran.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan menjadi alat bantu untuk mengungkapkan transaksi perusahaan beserta kinerjanya

kepada stakeholders. Untuk itu, laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.

Sebagaimana yang diungkapkan Direktur RSUD Delia selaku pengawas dan pengendali *Corporate Governance*: transparansi untuk laporan keuangannya telah muncul tiap tahun. Laporan keuangan perusahaan tidak ke publik akan tetapi perusahaan sharenya itu ke pimpinan RSUD, karyawan menjelaskan seperti itu laporan keuangan perusahaan, dari pimpinan di naikan ke cabang, begitu dipisahkan ke pimpinan laporan keuangan, maka bagian keuangan sudah lepas tanggung jawab. Tanggung jawabnya pimpinan untuk menjelaskan ke Aisyiyah cabang, sampe ke wilayah. Jadi publikasi kami hanya untuk level pimpinan perusahaan.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasanya publikasi laporan keuangan RSUD Delia hanyalah publikasi internal. Laporan keuangan hanya di publikasikan pada pihak-pihak tertentu, didalam tingkatan rumah sakit, mulai dari Direktur RSUD Delia, pimpinan RS.

Laporan keuangan yang dikeluarkan RSUD Delia selain hanya dipublikasikan ke pimpinan saja, juga dipublikasikan ke lembaga keuangan yang bekerja sama dengan RSUD Delia dalam pembiayaan rumah sakit. sebagaimana yang diungkapkan kabag penunjang umum; Lembaga keuangan/BANK yang bekerjasama dengan perusahaan dilihat dari laporan keuangannya. Bank melihat dulu, laporan keuangan perusahaan, perusahaan mengajukan laporan keuangan setelah di audit, jadi biar lebih layak di biayai atau tidak.

Berdasarkan wawancara diatas, RSUD Delia hanya mempublikasikan laporan keuangannya ke pimpinan saja, tetapi juga kepada lembaga keuangan yang

bekerjasama dengan RSUD Delia dalam hal pembiayaan. Lembaga Keuangan berhak tahu cash flow RSUD Delia seperti apa, sehingga RSUD Delia dianggap layak untuk bisa menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan tersebut.

Selain dari transparansi RAP dan LPJ, RSUD Delia juga sangat transparansi terkait pengadaan alat, penataan data, kualitas layanan dokter dan karyawan, dan juga pengalokasian dana.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa setiap hari senin diadakan rapat yang membahas mengenai masalah intern maupun ekstern rumah sakit. Dan setiap rapat memiliki notulen yang akan mencatat jalannya rapat hingga hasil dari rapat tersebut. Catatan notulen tersebut akan didokumentasikan sebagai acuan rumah sakit kedepannya.

#### **b. Akuntabilitas**

Dari segi akuntabilitas, penerapan *good corporate governance*, dapat dilihat pada struktur organisasi RSUD Delia. Manajemen RSUD Delia telah memiliki bagian-bagian dari struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas dan fungsi yang memudahkan kegiatan operasional rumah sakit dalam pelayanan kesehatan.

Dari setiap pelayanan medis di RSUD Delia, dilayani oleh staf/tenaga ahli sesuai di bidangnya masing-masing. Berdasarkan wawancara diatas, bahwasanya RSUD Delia menempatkan karyawannya sesuai pada bidangnya masing-masing, sehingga jelaslah job description masing-masing karyawan. Maka, dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rumah sakit akan mengakibatkan pengelolaan rumah sakit terlaksana secara efisien.

Selanjutnya pengembangan manajemen rumah sakit, yakni dengan Direktur membangun manajemen sistem informasi rumah sakit (SIRS) yang efektif dengan mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa tugas pelayanan ataupun manajemen rumah sakit harus ditangani oleh tenaga profesional. Untuk itu diperlukan adanya pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang diungkapkan Kabag penunjang umum; dengan adanya sistem yang baru, meskipun awalnya memang agak rumit juga...untuk sistem yang baru ini. Tetapi setelah berjalannya waktu, kita merasakan hasilnya, maksudnya dengan sistem yang baru ini memudahkan kerja kita

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa dengan berjalannya manajemen rumah sakit yang baru memudahkan jalannya kerja karyawan, meskipun timbul kendala-kendala diawal penerapan.

### **c. Responsibilitas**

Berdasarkan wawancara diatas, selain RSUD Delia memiliki amal usaha yang sesuai dengan peraturan dan izin dari kepala dinas kesehatan (Kadiknes), RSUD Delia juga memiliki sistem informasi rumah sakit (SIRS). Dengan diadakannya SIRS di RSUD Delia, dampaknya pada kemudahan karyawan dalam mengolah dan memasukkan data rumah sakit, dengan *billing system* yang terintergrasi.

Direktur bersama para Kabag bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan rumah sakit dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disetujui. Untuk itu Kabag wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan tidak lepas dari pengawasan Direktur.

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa tiap tahunnya diadakan program kerja yang salah satunya mengenai laporan pertanggung jawaban manajemen/keuangan untuk mengetahui eksistensi rumah sakit menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugasnya selama tahun berjalan.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa laporan pertanggung jawaban RSU Delia hanya diumumkan/dipublikasikan kepada pihak internal. Selama tiga tahun terakhir ini keuangan RSU Delia mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari persentase laba yang di hasilkan yaitu 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 25%,. Laporan keuangan juga diumumkan ke BANK yang bekerjasama dengan RSU Delia untuk meningkatkan kepercayaan BANK dalam menjalin hubungan kerjasama tersebut.

#### **d. Keadilan**

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa *reward* yang diberikan pada karyawan dengan kinerja yang bagus yaitu pada peningkatan premi/insentifnya. Tetapi pada karyawan dengan kinerja yang kurang bagus, dengan pengurangan premi/insentifnya dan juga peringatan langsung. Selain itu keadilan yang diterapkan RSU Delia.

Berdasarkan wawancara diatas, keadilan yang diterapkan RSU Delia pada kebutuhan pasien, seperti kemampuan pasien yang tidak mampu dalam membayar tarif pengobatan. RSU Delia menyediakan pemotongan harga bagi pasien yang tidak mampu. Selain itu RSU Delia juga menyiapkan SMS (*short message*

*service) Center* untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Berdasarkan wawancara diatas, pasien-pasien yang telah dilayani oleh RSUD Delia sebagian besar merasakan kenyamanan pada saat dilayani oleh karyawan RSUD Delia. Biaya/tarif pengobatanpun masih standar, maksudnya bila dibandingkan dengan rumah sakit lainnya biayanya tidak berbeda jauh. Penerapan 5S oleh RSUD Delia yaitu, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, sangat berperan penting bagi kenyamanan pasien.

#### **e. Independensi**

Independency yaitu Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Rumah Sakit sejauh ini mengelola perusahaan secara profesional, hal ini diakui narasumber bila terjadi konflik dalam perusahaan maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan. Kemudian masih ada karyawan yang bekerja yang tidak sesuai dengan job desknya hal tersebut diakui oleh narasumber. Rumah Sakit tidak menyertakan keterlibatan keluarga dari pemilik perusahaan untuk membuat suatu keputusan.

Dalam independency, perusahaan kurang maksimal dalam mengimplementasikannya. Dikarenakan masih adanya karyawan yang bekerja tidak sesuai job description. Kemudian konflik internal yang terjadi dalam perusahaan tidak menjadi halangan dalam membuat suatu keputusan. Nur'Ainy et.al (2013) menyampaikan bahwa independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh

atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Good corporate governance* Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat**

Rumah Sakit sudah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik, namun masih kurang maksimal. Global Environment Management Initiative (GEMI, 2003) menyebutkan bahwa Transparansi korporasi sebagai keterbukaan organisasi berkenaan dengan kesediaan berbagi informasi tentang bagaimana organisasi tersebut beroperasi. Ada beberapa hal yang tidak diterapkan oleh perusahaan dengan baik seperti keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan, dimana direktur hanya boleh sedikit mengetahui informasi laporan keuangan dalam perusahaan dan hanya jabatan tertentu yang boleh mengetahuinya. Transparansi berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas, dan tepat waktu (Wibowo, 2010).

Perusahaan sudah transparan mengenai kebijakan. Kebijakan perusahaan disampaikan secara lisan dan tertulis, serta disampaikan pada waktu rapat perusahaan. Kemudian perusahaan juga sudah transparan terhadap pemerintah dengan membayar pajak setiap bulannya.

Perusahaan sudah transparan mengenai kebijakan. Kebijakan perusahaan disampaikan secara lisan dan tertulis, serta disampaikan pada waktu rapat

perusahaan. Kemudian perusahaan juga sudah transparan terhadap pemerintah dengan membayar pajak setiap bulannya.

Dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan ke depan, maka berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (Sanim, 2011: 37-38).

Menurut KNKG (2006) Transparansi merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip transparansi pada rumah sakit ini dilihat dari aspek penyampaian visi, misi, kebijakan rumah sakit, serta informasi yang dibagikan karyawan dan pemerintah.

Menurut KNKG (2006) *Accountability* yaitu mengenai rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ serta kinerja dalam rumah sakit. Pada prinsip *accountability* di rumah sakit penyampaian dan penjelasan mengenai tanggungjawab masing-masing di sampaikan secara tertulis atau lisan. Mengenai alur pertanggung jawaban pun harus sangat jelas. Setiap staff atau perawat rumah sakit wajib melaporkan setiap kegiatannya kepada kepala unit masing-masing.

Menurut KNKG (2006) *Responsibility* merupakan bentuk kepatuhan rumah sakit terhadap hukum dan perundang-undangan tentang pelayanan rumah sakit serta tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar.

Menurut KNKG (2006) *Independency* yaitu rumah sakit harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Rumah Sakit harus

mengelola perusahaan secara profesional, bila terjadi konflik dalam rumah sakit maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan.

Menurut KNKG (2006) *Fairness* yaitu rumah sakit harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas atau minoritas, pasien serta karyawan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Rumah sakit memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk memberikan saran dan pendapatnya untuk memajukan perusahaan.

Perusahaan telah menerapkan prinsip *responsibility*, namun tidak diterapkan secara maksimal seperti masih adanya karyawan yang tidak menaati aturan yang ada. Dalam pedoman KNKG (2006) menyebutkan bahwa pihakpihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada hukum yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Masih adanya pemberian gaji pada karyawan yang tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten.

Perusahaan juga sudah melakukan pengolahan limbah cair, serta melakukan *corporate social responsibility* terhadap masyarakat berupa pelayanan secara gratis. KNKG (2006) menyebutkan bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Dalam *independency*, perusahaan kurang maksimal dalam mengimplementasikannya. Dikarenakan masih adanya karyawan yang bekerja tidak sesuai *job description*. Kemudian konflik internal yang terjadi dalam

perusahaan tidak menjadi halangan dalam membuat suatu keputusan. Nur'Ainy et.al (2013) menyampaikan bahwa independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam prinsip *fairness* disebutkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Dalam hal ini perusahaan sudah menerapkannya dengan baik. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk menyampaikan pendapat dan memberi saran. Perlakuan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan juga diperlakukan secara adil dan tidak adanya saling menjahui satu sama lain. Perusahaan juga mempunyai layanan customer service untuk menerima saran dan kritik serta komplain dari customer. Fairness juga diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian hukum yang berlaku dan regulasi (Nur'Ainy et al., 2013).

## **2. Faktor Yang Menyebabkan penerapan *Good corporate governance* belum berjalan dengan optimal Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat**

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate*

*governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djarmiko, 2004). Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil di antara

berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam stuktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporate governance pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa RSUD Delia belum efektif dalam menerapkan prinsip GCG maka hal tersebut dapat mengakibatkan, tidak adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rumah sakit dan mengakibatkan pengelolaan rumah sakit tidak terlaksana secara efisien.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan tentang penerapan *good corporate governanvce* pada RSUD Delia Stabat, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran.

1. Prinsip transparansi RSUD Delia masih belum melaksanakan secara menyeluruh dikarenakan informasi laporan keuangan tidak seluruhnya diketahui oleh direktur. Dari sisi transparansi yang sudah dijalankan, subjek penelitian sudah menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis dengan jelas. Penyampaian mengenai informasi kebijakan telah disampaikan secara terbuka melalui rapat-rapat dan secara lisan maupun tertulis. Subjek penelitian juga sudah terbuka terhadap konsumen melalui website yang berisi informasi tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan. Perusahaan juga sudah terbuka terhadap pemerintah melalui laporan pembayaran pajak setiap bulan dan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan pajak. Subjek penelitian juga sudah terbuka terhadap karyawan mengenai masalah gaji dan poin-poin jasa pelayanan yang di dapat selama bekerja.
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung

terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal

## **B. Saran**

1. RSUD Delia hendaknya memberikan gaji karyawannya sesuai dengan UMK dan memberikan jaminan BPJS kepada karyawan yang belum memiliki jaminan BPJS
2. RSUD Delia diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan agar dapat terciptanya prinsip *good governance* (GCG) yang optimal
3. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dijadikan referensi peneliti untuk menyusun tugas akhir diharapkan bisa menyusun lebih baik lagi dari yang referensi sebelumnya dengan mempunyai lebih dari satu referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Azlan Dan Susela Devi. (2008). The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On *Good corporate governance* (GCG). *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23 Iss: 4, pp.386 – 404.
- Anggraini, Fr, Reni Retno. (2006). *Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial. Reporting In Malaysia*. Skripsi Universitas Sains Malaysia
- Apriwenni, P. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Good corporate governance* (GCG) pada Laporan Tahunan Perusahaan untuk Industri Manufaktur Tahun 2008. *IBII, Jakarta*.
- Carningsih, 2009. *Pengaruh Good corporate governance Terhadap Hubungan Antar Kinerja Keuangan Dengan Nilai Perusahaan*, Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi UGM
- Cheng, Megawati dan Christiawan, Yulius Jogi. 2011. Pengaruh Pengungkapan *Good corporate governance* (GCG) Terhadap Abnormal Return. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan No.1 Vol.13*
- Ghozali, Imam (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat*, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna Dharma Chinn, Richard. (2000). *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd, London.
- Effendi Arief. (2009). *The Power of Good corporate governance : Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina. (2008). *Metedologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan
- Hadi, Syamsul. (2006). *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Ekonisia, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syahfri. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2009). *SPSS Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penelitian UNDIP. Semarang.
- Huafang, Xiao dan Jianguo, Yuan. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in China. *Managerial Auditing Journal Vol. 22 No. 6*

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- IskanDK, Magdi R. dan NaDKeh Chamlou. (2000). *Corporate Governance: A Framework for Implementation. The International Bank for Reconstruction and Development. Journal ISBN 0-8213-4741-1*
- Jogianto Hartono. (2004) *Metedologi Penelitian Dan Bisnis: Salah Kapra Dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE, Jogjakarta.
- Matoussi, H. dan R. Chakroun (2008) *Board Composition, Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports: Evidence from Tunisia*. Jurnal tidak diterbitkan. Tunisia Gestion University.
- Said. (2009). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Thomas. S Raihan. (2006). *GCG dan Penerapan Di Indonesia*.Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan *Vo. 8 No. 1 Ed Maret*.
- Thomas S. Kaihatu. (2006). *Good corporate governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1 Ed Maret*
- Umar, Husein. (2003). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang Perseoran Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- Wibisono. (2007). *Memebedah Konsep dan Aplikasi Good corporate governance (GCG)*. Surabaya: Media Grapka